



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD FARID**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA LAKSANA PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**
3. NHK : **969369**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.572.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m²/45 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 237 m²/140 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI , Rp. 850.000.000
3. Tanah Seluas 129 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 322.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **244.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALL NEW RUSH TRD SPORTIVO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **5.549.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **1.822.049.000**

III. HUTANG Rp. **714.000.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.108.049.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.